



SMART DISCUSSION SERIES 2022

Tips dan Trik Analisis Informasi Data Kinerja (*Disclosure*) pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Disampaikan Pada 10 Februari 2022
Smart Discussion Series 2 Tahun 2022

Akhmad Amirudin, S.AP, M.AP, M.Pol, Sc



**SMART
DISCUSSION**
SERIES 2022

Akhmad Amirudin, S.AP, M.AP, M.Pol, Sc

Riwayat Pendidikan

Sarjana Administrasi Publik (S.AP)

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

Magister Administrasi Publik (M.AP)

Fakultas Ilmu Administrasi universitas Brawijaya

Master of Political Science (M.Pol,Sc)

Burapha University - Thailand

Pengalaman Pendampingan Pemerintah Daerah

- **Tenaga Ahli Penyusunan Analisis Potensi Kecamatan Kabupaten Kediri**
- **Tenaga Ahli Kajian Akademis Analisis Beban Kerja untuk Perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai Kabupaten Lamandau**
- **Tenaga Ahli Penyusunan LKjIP Kabupaten Pangandaran**
- **Tenaga Ahli Penyusunan LKjIP Sekretariat DPRD Kabupaten Deli Serdang**
- **DII**



**Tenaga Ahli dan Chief Human &
Technology Officer SmartID**



OUTLINE PEMBAHASAN

1

Tinjauan Teori Dan
Konsep Evaluasi Dalam
Pelaporan Kinerja Dan
Fungsi-fungsi
Manajemen

2

Komposisi SAKIP

3

Penjabaran tentang
Surat Edaran Menpan
Nomor 5 Tahun 2021

4

Sistematika LPPD

5

Sistematika LKjIP

6

Lembar Kriteria Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja
Instansi
Pemerintah Pusat

7

Upaya dalam Menyusun
Laporan Kinerja



SMART DISCUSSION SERIES 2022

TINJAUAN TEORI DAN KONSEP EVALUASI DALAM PELAPORAN KINERJA DAN FUNGSI- FUNGSI MANAJEMEN



FUNGSI-FUNGSI MANAJEMEN



Salah satu upaya untuk manajemen kinerja yang efektif adalah mengevaluasi kinerja

Source : Barry Silverstein (2007)

Evaluasi Kebijakan Publik

1. Evaluasi Administratif

Yang berkenaan dengan evaluasi sisi administratif – anggaran, efisiensi, biaya – dari proses kebijakan di dalam pemerintah yang berkenaan dengan:

- a. *Effort evaluation*, yang menilai dari sisi input program yang dikembangkan oleh kebijakan.
- b. *Performance evaluation*, yang menilai keluaran (output) dari program yang dikembangkan oleh kebijakan.
- c. *Adequacy of performance evaluation* atau *effectiveness evaluation*, yang menilai apakah program dijalankan sebagaimana yang sudah ditetapkan.
- d. *Efficiency Evaluation*, yang menilai biaya program dan memberikan penilaian tentang keefektifan biaya tersebut.
- e. *Process Evaluation*, yang menilai metode yang dipergunakan oleh organisasi untuk melaksanakan program.

2. Evaluasi Judisial

yaitu evaluasi yang berkenaan dengan isu keabsahan hukum tempat kebijakan diimplementasikan, termasuk kemungkinan pelanggaran terhadap konstitusi, sistem hukum, etika, aturan administrasi negara, hingga hak asasi manusia.

3. Evaluasi Politik

yaitu menilai sejauh mana penerimaan konstitusi politik terhadap kebijakan publik yang diimplementasikan.



TINJAUAN TEORI DAN KONSEP EVALUASI DALAM PELAPORAN KINERJA

POSDICORB



Salah satu upaya untuk manajemen kinerja yang efektif adalah pelaporan kinerja



SMART DISCUSSION SERIES 2022

KOMPOSISI SAKIP





SMART DISCUSSION SERIES 2022

KOMPONEN SAKIP



- ✓ **INPRES No 7 tahun 1999** (LAN untuk perencanaan, BPKP untuk evaluasi) tentang LAKIP
- ✓ **UU Nomor 28 Tahun 1999** tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari KKN. Azas akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara.
- ✓ **UU Nomor 17 Tahun 2003** tentang Keuangan Negara
- ✓ **UU Nomor 1 Tahun 2004** tentang Perbendaharaan Negara. Asas pengelolaan keuangan negara adalah akuntabilitas berorientasi hasil. Penerapan anggaran berbasis prestasi kerja.
- ✓ **PP Nomor 8 Tahun 2006** tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Kewajiban melaporkan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja pemerintah
- ✓ **PERPRES Nomor 29 Tahun 2014** tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. SAKIP diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran berorientasi pada hasil
- ✓ **PERMENPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014** tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
- ✓ **PERMENPAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015** tentang Pedoman Evaluasi dan Implementasi SAKIP



KOMPONEN EVALUASI

Permenpan 12/2015



Permenpan 88/2021





SMART DISCUSSION SERIES 2022

**SURAT EDARAN
MENPAN NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG PELAPORAN KINERJA
PEMERINTAH DAERAH**



SmartID



**SMART
DISCUSSION**
SERIES 2022

Surat Edaran Menpan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah



**Pelaporan Kinerja Untuk Pemerintah
Kabupaten / Kota dan Provinsi**

**Laporan Kinerja bagi Perangkat
Daerah**



**SMART
DISCUSSION
SERIES 2022**

Pelaporan Kinerja Untuk Pemerintah Kabupaten / Kota dan Provinsi



Terhitung sejak terbitnya Permendagri 18/2020, Pemerintah daerah Kab/Kota/Prov tidak menyusun Lkj tersendiri karena laporan kinerja pemerintah Kab/Kota/Prov disusun menjadi satu dengan LPPD

Sistematika LPPD mengikuti Permendagri 18/2020

Informasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah yang terdapat pada LPPD mencakup Perencanaan Kinerja dan Capaian Akuntabilitas Kinerja

Perencanaan kinerja dijelaskan dalam LPPD pada BAB I terkait pembangunan daerah dengan informasi tentang tujuan, indikator tujuan, sasaran, indikator sasaran dan target kinerja sesuai dengan tabel 5.2 RPJMD serta menyajikan laporan kinerja KDH tahun pelaporan

Capaian akuntabilitas kinerja dijelaskan dalam LPPD pada BAB II terkait Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah



**SMART
DISCUSSION
SERIES 2022**

Pelaporan Kinerja Untuk Pemerintah Kabupaten / Kota dan Provinsi

Informasi Capaian akuntabilitas Pemerintah Daerah Pada BAB II LPPD memuat



1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini berdasarkan perjanjian kinerja kepala daerah;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen jangka menengah / RPJMD
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis Program / Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
7. Analisis efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya

Informasi akuntabilitas kinerja harus direviu terlebih dahulu oleh Inspektorat dengan hasil reviu / pernyataan telah di reviu dilampirkan pada LPPD

LPPD disampaikan oleh Gubernur / Bupati / Walikota pada Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir secara daring melalui esr.menpan.go.id



**SMART
DISCUSSION**
SERIES 2022

PELAPORAN KINERJA BAGI PERANGKAT DAERAH



Setiap Perangkat Daerah menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan

Penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah Mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014

Laporan kinerja tahunan perangkat daerah disampaikan oleh kepala perangkat daerah kepada Bupati / Walikota / Gubernur paling lambat 2 (dua) Bulan setelah tahun anggaran berakhir, serta disampaikan pada menteri PANRB bersamaan dengan penyampaian LPPD secara daring melalui esr.menpan.go.id yang akan digunakan sebagai dasar evaluasi penerapan SAKIP



SMART DISCUSSION SERIES 2022

SISTEMATIKA LPPD BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 18 TAHUN 2020





**SMART
DISCUSSION**
SERIES 2022

SISTEMATIKA LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD)



BAB I

Pendahuluan

BAB II

Capaian Kinerja
Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah

BAB III

Capaian Kinerja
Pelaksanaan Tugas
Pembantuan

BAB IV

Penerapan dan
Pencapaian Standar
Pelayanan Minimal

BAB V

Penutup





Latar Belakang

1.1.1 Penjelasan Umum

Bagian ini memuat informasi tentang profil daerah secara umum yang meliputi beberapa hal sebagai berikut :

- a. Undang-undang pembentukan daerah
- b. Data geografis wilayah
- c. Jumlah penduduk
- d. Jumlah kecamatan dan desa/ kelurahan (untuk kabupaten/kota)
- e. Jumlah perangkat daerah, unit kerja perangkat daerah dan pegawai pemerintah
- f. Realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah.

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

Bagian ini memuat informasi yang meliputi beberapa hal sebagai berikut :

- a. Permasalahan strategis pemerintah daerah
- b. Visi dan misi kepala daerah
- c. Program pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan tahunan
- d. Kegiatan pembangunan daerah berdasarkan dokumen perencanaan tahunan

1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Bagian ini memuat hal-hal terkait

1. Dasar pertimbangan penerapan SPM,
2. Dasar penerapan SPM
3. Kebijakan umum daerah dalam rencana penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah
4. Gambaran orientasi dan komitmen yang ditetapkan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam kebijakan umum anggaran



BAB 2 CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1. Capaian Kinerja Makro

”

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun n-1	Capaian Kinerja Tahun n	Perubahan (%)
1	2	3	4	5
1	Indeks Pembangunan Manusia			
2	Angka Kemiskinan			
3	Angka Pengangguran			
4	Pertumbuhan Ekonomi			
5	Pendapatan Per Kapita			
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)			



**2.2 Capaian Kinerja
Penyelenggaraan
Urusan Pemerintah**

**2.2.1. Indikator Kinerja Kunci
Keluaran**

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Pendidikan			
2	Kesehatan			
3			
Dst				

2.2.2. Indikator Kinerja Kunci Hasil

No	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	Pendidikan			
2	Kesehatan			
3			
dst				

**2.2.3. Indikator Kinerja Kunci untuk
Fungsi Penunjang Urusan
Pemerintahan**

No	Fungsi Penunjang	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun N	Sumber Data
1	Perencanaan Keuangan			
2	Keuangan			
3	Kepegawaian			
4	Transparansi dan Partisipasi Publik			
dst				



2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

”

Akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah menginformasikan capaian keberhasilan pemerintah daerah dalam pelaksanaan visi dan misi pemerintah daerah secara terukur, sebagaimana yang diperjanjukkan dalam perjanjian kinerja kepala daerah. Informasi capaian akuntabilitas pemerintah daerah memuat :

- a. Target kinerja dalam perjanjian kinerja
- b. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja
- c. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya
- d. Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah
- e. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai
- f. Analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja





**Dasar hukum penyelenggaraan tugas
pembantuan**

**Gambaran umum pelaksanaan tugas
pembantuan di Provinsi**

**Capaian kinerja pelaksanaan tugas
pembantuan**



3.3 Permasalahan dan Kendala

Permasalahan dan kendala menggambarkan permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pembantuan, baik dari aspek administrasi, keuangan maupun teknis kegiatan.

3.4 Saran dan Tindak Lanjut

Saran dan tindak lanjut berisi masukan dan saran serta Langkah tindak lanjut untuk penyelesaian permasalahan sebagai bahan perbaikan dalam perencanaan tugas pembantuan ke depan.





4.1 Urusan Pendidikan

Laporan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal memuat :

1. Jenis pelayanan daerah

4. Alokasi anggaran

2. Target pencapaian standar pelayanan minimal oleh daerah

5. Dukungan personil

3. Realisasi

6. Permasalahan dan solusi





4.2. Urusan Kesehatan

4.3. Urusan Pekerjaan Umum

4.4. Urusan Perumahan Rakyat

**4.5. Urusan Ketentraman,
Ketertiban Umum, dan
Perlindungan Masyarakat**

4.6. Urusan Sosial

4.7. Program dan Kegiatan



SmartID



**SMART
DISCUSSION**
SERIES 2022

BAB 5 PENUTUP



Menampilkan kesimpulan umum atas penyelenggaraan pemerintah daerah



SMART DISCUSSION SERIES 2022

SISTEMATIKA LKjIP BERDASARKAN PERMENPANRB NOMOR 53 TAHUN 2014





SMART
DISCUSSION
SERIES 2022

LAPORAN KINERJA



Laporan kinerja merupakan **bentuk akuntabilitas** dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah **pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan** (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.



INSTANSI PEMERINTAH

Tugas dan Fungsi



Anggaran

Akuntabilitas / Pertanggungjawaban

LAPORAN KINERJA

**Pengukuran Capaian
Perjanjian Kinerja**

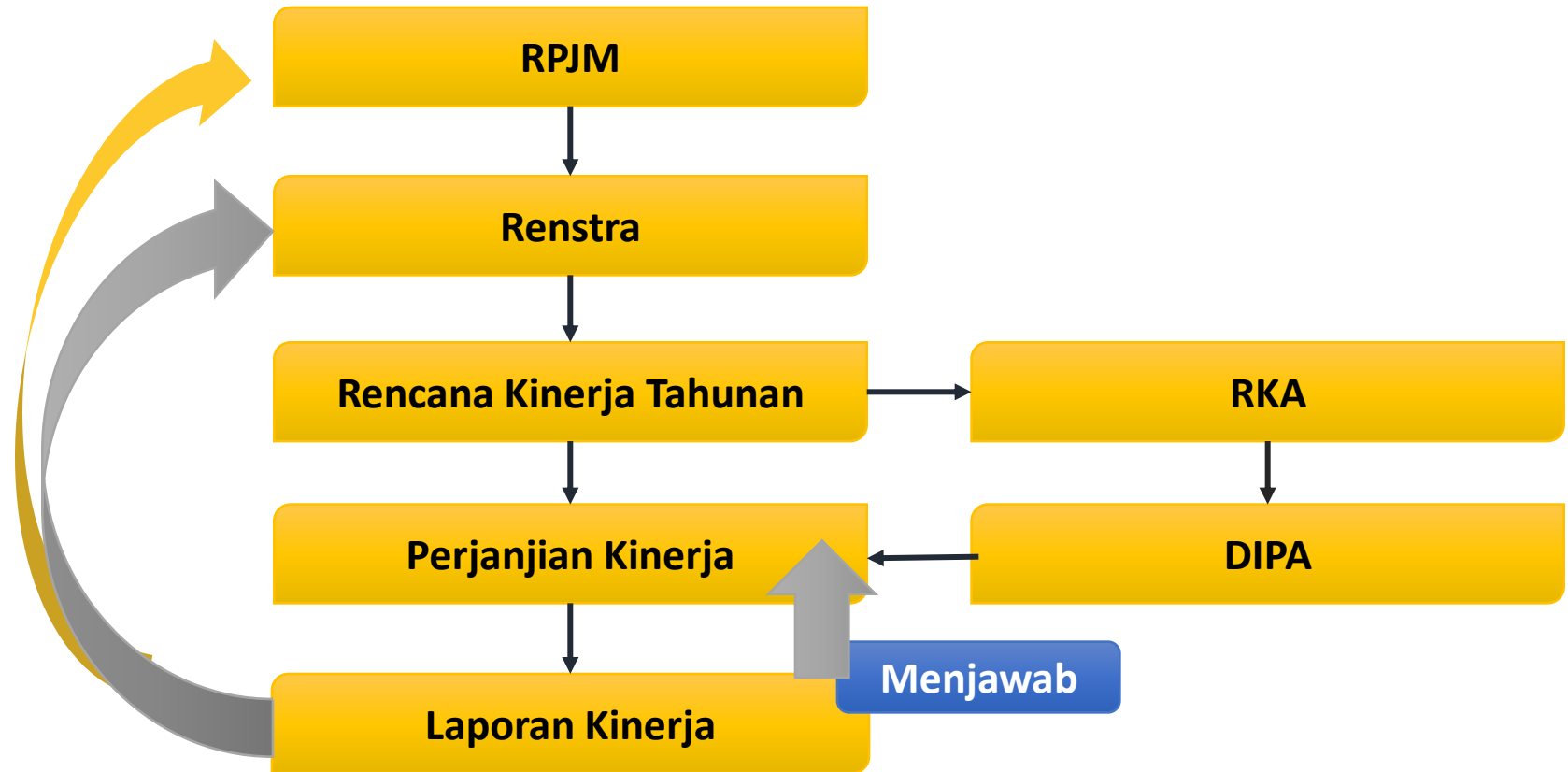
Evaluasi dan Analisa





LAPORAN KINERJA

**Feedback &
Continuous
Improvement**





**SMART
DISCUSSION**
SERIES 2022

TUJUAN PELAPORAN KINERJA



Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai

Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Unit Kerja untuk meningkatkan kinerjanya



**SMART
DISCUSSION**
SERIES 2022

FUNGSI PELAPORAN KINERJA

Media Hubungan Kerja Organisasi

Media Akuntabilitas

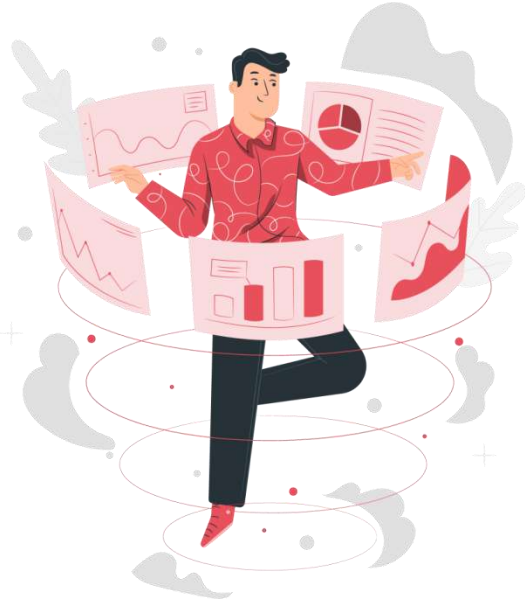
Media Informasi Umpan Balik Perbaikan Kinerja

Media Informasi Penilaian Keberhasilan dan Kegagalan Dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi yang Diamanahkan





KOMPONEN LKJIP



**MENYAJIKAN
INFORMASI
TENTANG**

Uraian singkat organisasi (tugas dan fungsi)

**Rencana dan target kinerja yang ditetapkan
(Perjanjian Kinerja)**

Pengukuran capaian kinerja

**Evaluasi dan analisis pencapaian kinerja. Analisis ini
juga mencakup atas efisiensi penggunaan sumber
daya**



FORMAT LAPORAN KINERJA

BAB I PENDAHULUAN



Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, aspek Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.



BAB II PERENCANAAN KINERJA



Menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA



Meliputi Capaian kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran



BAB IV PENUTUP



Simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya



LAMPIRAN



Perjanjian Kinerja dan lain-lain yang dianggap perlu



SmartID



**SMART
DISCUSSION**
SERIES 2022

BAB 1: PENDAHULUAN



- 1. Latar Belakang**
- 2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja**
- 3. Aspek Strategis serta permasalahan utama**
- 4. Landasan Hukum**
- 5. Sistematika**

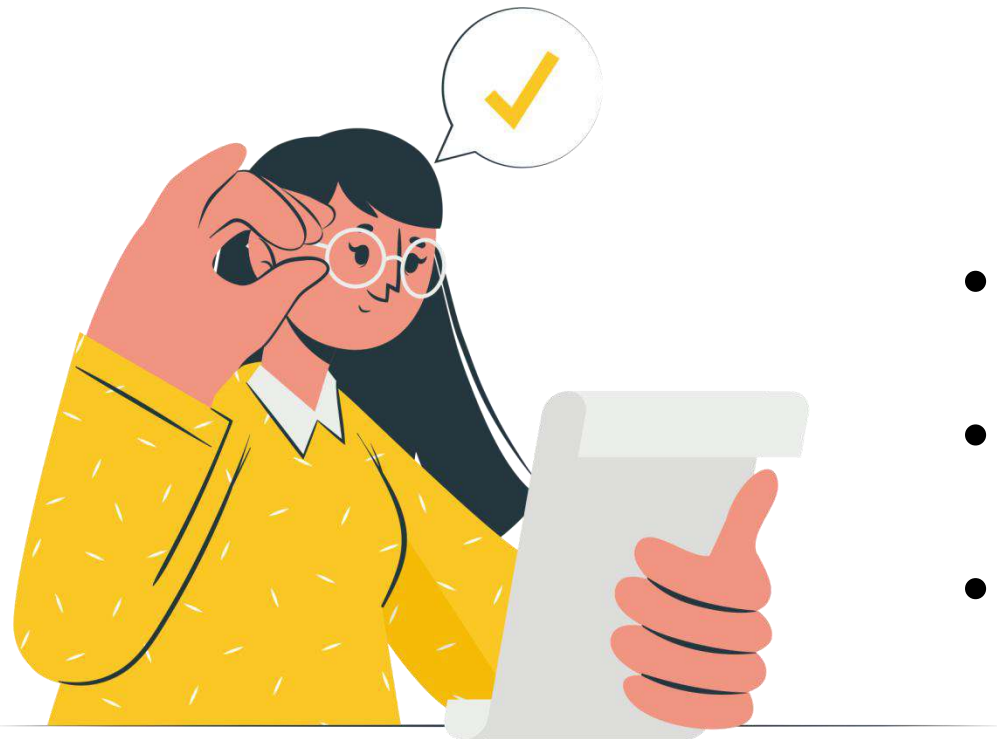


SmartID



**SMART
DISCUSSION**
SERIES 2022

BAB II: PERENCANAAN KINERJA



- **RENCANA STRATEGIS**
- **RENCANA KINERJA TAHUN 2021**
- **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**



BAB II: PERENCANAAN KINERJA

Memuat penjelasan singkat mengenai Rencana Strategis yang terdiri dari:

- 1 **Visi**
 2 **Misi**
 3 **Tujuan dan Sasaran:** memuat table seperti dibawah ini

Contoh tabel

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	xx	xx	xx	xx	xx
					
		1.1	xx	xx	xx	xx	xx
							
		1.2	xx	xx	xx	xx	xx
							



BAB II: PERENCANAAN KINERJA

Menyajikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Tabel Perjanjian Kinerja

NO	TUJUAN/ ASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
	XX	XX
		
	XX	XX
		
	XX	XX
		

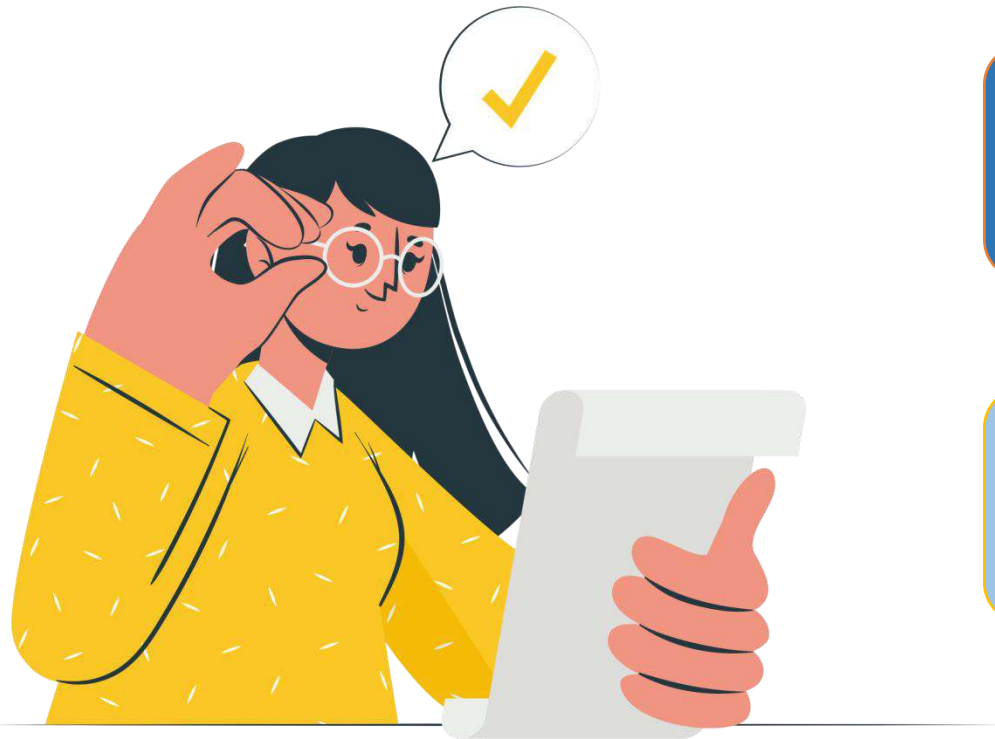
Tabel Program dan Kegiatan

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATO R KINERJA	TARGET	ANGGAR AN
1	2	3	4	5



**SMART
DISCUSSION**
SERIES 2022

BAB III: AKUNTABILITAS KINERJA



3.1 Capaian Kinerja Organisasi

3.2 Realisasi Anggaran



SmartID



**SMART
DISCUSSION**
SERIES 2022

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Contoh Skala nilai peringkat kinerja

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
(1)	$91\% \leq 100\%$	Sangat tinggi
(2)	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
(3)	$66\% \leq 75\%$	Sedang
(4)	$51\% \leq 65\%$	Rendah
(5)	$\leq 50\%$	Sangat Rendah



SmartID



**SMART
DISCUSSION**
SERIES 2022

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI



Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. **Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;**
2. **Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;**
3. **Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;**
4. **Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);**
5. **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;**
6. **Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;**
7. **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).**



3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI



Memuat capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja.

Tabel Capaian Indikator Kinerja Utama

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
1							
2							
3							



3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Tabel Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2021	Target Akhir 2023	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	$6=4/5*100$

Tabel Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota lain

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2021	Standar Nasional	% Capaian
1	2	3	4	5	$6=4/5*100$



3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Tabel Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan

Tabel Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang



Menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja

Tabel Capaian Anggaran Program dan kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%Capaian



Memuat analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah

Tabel Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	%Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%Capaian	



BAB III: TINGKAT EFISIENSI PENGUNAAN SUMBER DAYA



PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 214/PMK.02/2017 TENTANG PENGUKURAN DAN EVALUASI KINERJA ANGGARAN ATAS PELAKSANAAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA



Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran.

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

- E** : Efisiensi
- PAKi** : Pagu anggaran keluaran i
- RAKi** : Realisasi anggaran keluaran i
- CKi** : Capaian keluaran i



SmartID



**SMART
DISCUSSION**
SERIES 2022

BAB V: PENUTUP



**Menampilkan Kesimpulan
Umum atas Capaian Kinerja
Organisasi**



SMART DISCUSSION SERIES 2022

LEMBAR KRITERIA EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PUSAT



SmartID



**SMART
DISCUSSION**
SERIES 2022

PENYAJIAN INFORMASI KINERJA

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	PENJELASAN	
		KEM/LPND	UNIT KERJA
II.	PENYAJIAN INFORMASI KINERJA		
6	Laporan Kinerja menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi <i>outcome</i>	a. b. c. d. e.	Apabila lebih dari 95% sasaran yang disampaikan dalam laporan kinerja berorientasi <i>outcome</i> Apabila 80% < sasaran <i>outcome</i> dalam laporan kinerja \leq 95%; Apabila 40% < sasaran <i>outcome</i> dalam laporan kinerja \leq 80%; Apabila 20% < sasaran <i>outcome</i> dalam laporan kinerja \leq 40% Apabila sasaran <i>outcome</i> dalam Laporan Kinerja \leq 20%
		Informasi Laporan Kinerja berorientasi <i>outcome</i> artinya:	
		1. 2. 3.	Informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja menggambarkan hasil-hasil (termasuk <i>output-output</i> penting) yang telah dicapai dan seharusnya tercapai sampai dengan saat ini Laporan Kinerja tidak hanya berfokus pada informasi tentang kegiatan atau proses yang telah dilaksanakan pada tahun yang bersangkutan Laporan Kinerja tidak berorientasi hanya pada informasi tentang realisasi seluruh anggaran yang telah digunakan
7	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan	a. b. c. d. e.	Apabila lebih dari 95% capaian yang disajikan bersifat kinerja yang dijanjikan/disepakati dalam Perjanjian Kinerja (PK); Apabila 80% < capaian yang disajikan bersifat kinerja yang dijanjikan dalam PK \leq 95%; Apabila 40% < capaian yang disajikan bersifat kinerja yang dijanjikan dalam PK \leq 80%; Apabila 20% < capaian yang disajikan bersifat kinerja yang dijanjikan dalam PK \leq 40% Apabila capaian yang disajikan bersifat kinerja yang dijanjikan dalam PK \leq 20%



SUB KOMPONEN PENYAJIAN INFORMASI KINERJA

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	PENJELASAN	
		KEM/LPND	UNIT KERJA
8	Laporan Kinerja menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja	<ul style="list-style-type: none"> a. Apabila Laporan Kinerja menyajikan lebih dari 95% sasaran yang dievaluasi dan dianalisis capaiannya bersifat kinerja (<i>outcome</i>), bukan proses; b. Apabila 80% < sasaran yang dievaluasi dan dianalisis capaiannya bersifat kinerja (<i>outcome</i>), bukan proses \leq 95%; c. Apabila 40% < sasaran yang dievaluasi dan dianalisis capaiannya bersifat kinerja (<i>outcome</i>), bukan proses \leq 80%; d. Apabila 20% < sasaran yang dievaluasi dan dianalisis capaiannya bersifat kinerja (<i>outcome</i>), bukan proses \leq 40% e. Apabila sasaran yang dievaluasi dan dianalisis capaiannya bersifat kinerja (<i>outcome</i>), bukan proses \leq 20% 	
		Menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja, artinya:	
			Laporan Kinerja menguraikan hasil evaluasi dan analisis tentang capaian-capaian kinerja <i>outcome</i> atau <i>output</i> penting, bukan hanya proses atau realisasi kegiatan-kegiatan yang ada di dokumen anggaran (DIPA)
9	Laporan Kinerja menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan	<ul style="list-style-type: none"> a. Apabila Laporan Kinerja menyajikan seluruh perbandingan sebagaimana yang tercakup dalam kriteria dibawah b. Laporan Kinerja menyajikan seluruh perbandingan sebagaimana yang tercakup dalam kriteria dibawah, kecuali perbandingan dengan standar nasional; c. Apabila Laporan Kinerja hanya menyajikan perbandingan Realisasi dengan Target dan Kinerja tahun berjalan dengan kinerja tahun sebelumnya; d. Apabila Laporan Kinerja hanya menyajikan perbandingan Realisasi dengan Target; e. Apabila tidak ada perbandingan data kinerja (capaian sasaran) 	
		Perbandingan yang memadai. mencakup:	
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Target dengan Realisasi; 2. Realisasi tahun berjalan dengan realisasi tahun sebelumnya; 3. Realisasi sampai dengan tahun berjalan dengan target jangka menengah; 4. Realisasi atau capaian tahun berjalan dibanding standar nasional atau RPJMN 5. Realisasi atau capaian organisasi/instansi dibanding realisasi atau capaian organisasi/instansi sejenis yang setara atau sekelas. 	



SUB KOMPONEN PENYAJIAN INFORMASI KINERJA

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	PENJELASAN	
		KEM/LPND	UNIT KERJA
10	Laporan Kinerja menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya	<ul style="list-style-type: none"> a. Jika besaran efisiensi yang terjadi dapat dikuantifikasikan b. Jika hanya berupa info tentang efisiensi yang telah dilakukan c. Jika hanya berupa info tentang upaya efisiensi yang dilakukan d. Jika tidak ada informasi tentang efisiensi. 	
11	Laporan Kinerja menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi	<ul style="list-style-type: none"> a. Apabila Laporan Kinerja mampu menyajikan informasi keuangan yang terkait langsung dengan seluruh pencapaian sasaran (<i>outcome</i>); b. Apabila Laporan Kinerja mampu menyajikan informasi keuangan atas $\geq 80\%$ sasaran c. Apabila Laporan Kinerja hanya menyajikan informasi keuangan atas $\geq 50\%$ sasaran; d. Apabila Laporan Kinerja hanya menyajikan realisasi keuangan atas $< 50\%$ sasaran e. Apabila tidak ada informasi keuangan yang dapat dikaitkan dengan sasaran atau kinerja tertentu 	
12	Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja dapat diandalkan	<ul style="list-style-type: none"> a. Apabila lebih dari 95% realisasi kinerja dapat diandalkan sesuai dengan kriteria; b. Apabila $80\% < \text{keandalan data realisasi kinerja} \leq 95\%$; c. Apabila $40\% < \text{keandalan data realisasi kinerja} \leq 80\%$; d. Apabila $20\% < \text{keandalan data realisasi kinerja} \leq 40\%$ e. Apabila keandalan data realisasi kinerja $\leq 20\%$ 	
		Dapat diandalkan dengan kriteria:	
		<ul style="list-style-type: none"> 1. Datanya valid 2. Dapat ditelusuri ke sumber datanya 3. Diperoleh dari sumber yang kompeten 4. Dapat diverifikasi 5. Konsisten 	



SmartID



SMART DISCUSSION

SERIES 2022

PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	PENJELASAN	
		KEM/LPND	UNIT KERJA
III.	PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA		Jawaban tentang pemanfaatan informasi kinerja harus selalu dikaitkan dengan (dipengaruhi oleh) kondisi (jawaban) tentang Pemenuhan Pelaporan dan Penyajian Informasi Kinerja
13	Informasi kinerja telah digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja	YA	jika informasi kinerja dalam laporan kinerja dapat dimanfaatkan dalam evaluasi AKIP
			Istilah dapat dimanfaatkan sangat terkait dengan kualitas informasi kinerja. Jika capaian bobot kualitas informasi kinerja (C.II) kurang dari 60%. maka informasi kinerja dianggap tidak dapat dimanfaatkan (tidak bermanfaat)
14	Informasi yang disajikan telah digunakan dalam perbaikan perencanaan		<p>Pemilihan a, b, c, d, atau e didasarkan pada <i>professional judgement evaluator</i>, dengan tetap memperhatikan kriteria yang ditetapkan.</p> <p>Sebagai ilustrasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Apabila pemanfaatan bersifat ekstensif dan menyeluruh b. Apabila pemanfaatan bersifat ekstensif namun belum menyeluruh (sebagian) c. Apabila pemanfaatan hanya bersifat sebagian d. Apabila kurang dimanfaatkan e. Apabila tidak ada pemanfaatan
			Telah digunakan dalam perbaikan perencanaan, artinya:
			Laporan Kinerja yang disusun sampai dengan saat ini telah berdampak kepada perbaikan perencanaan, baik perencanaan jangka menengah, tahunan maupun dalam penetapan atau perjanjian kinerja yang disusun.



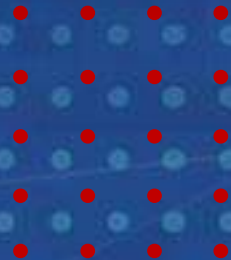
SUB KOMPONEN PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	PENJELASAN	
		KEM/LPND	UNIT KERJA
15	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Apabila pemanfaatan bersifat ekstensif dan menyeluruh b. Apabila pemanfaatan bersifat ekstensif namun belum menyeluruh (sebagian) c. Apabila pemanfaatan hanya bersifat sebagian d. Apabila kurang dimanfaatkan e. Apabila tidak ada pemanfaatan 	<p>Pemilihan a, b, c, d, atau e didasarkan pada <i>professional judgement evaluator</i>, dengan tetap memperhatikan kriteria yang ditetapkan.</p> <p>Sebagai ilustrasi:</p>
		Telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan, artinya:	
		Informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja telah mengakibatkan perbaikan dalam pengelolaan program dan kegiatan dan dapat menyimpulkan keberhasilan atau kegagalan program secara terukur	
16	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk peningkatan kinerja	<ul style="list-style-type: none"> a. Apabila pemanfaatan bersifat ekstensif dan menyeluruh b. Apabila pemanfaatan bersifat ekstensif namun belum menyeluruh (sebagian) c. Apabila pemanfaatan hanya bersifat sebagian d. Apabila kurang dimanfaatkan e. Apabila tidak ada pemanfaatan 	<p>Pemilihan a, b, c, d, atau e didasarkan pada <i>professional judgement evaluator</i>, dengan tetap memperhatikan kriteria yang ditetapkan.</p> <p>Sebagai ilustrasi:</p>
		Telah digunakan untuk peningkatan kinerja, artinya:	
		Terdapat bukti yang cukup bahwa informasi dalam Laporan Kinerja (termasuk Laporan Kinerja tahun sebelumnya) telah digunakan untuk perbaikan capaian kinerja organisasi yang lebih baik periode berikutnya	



SMART DISCUSSION SERIES 2022

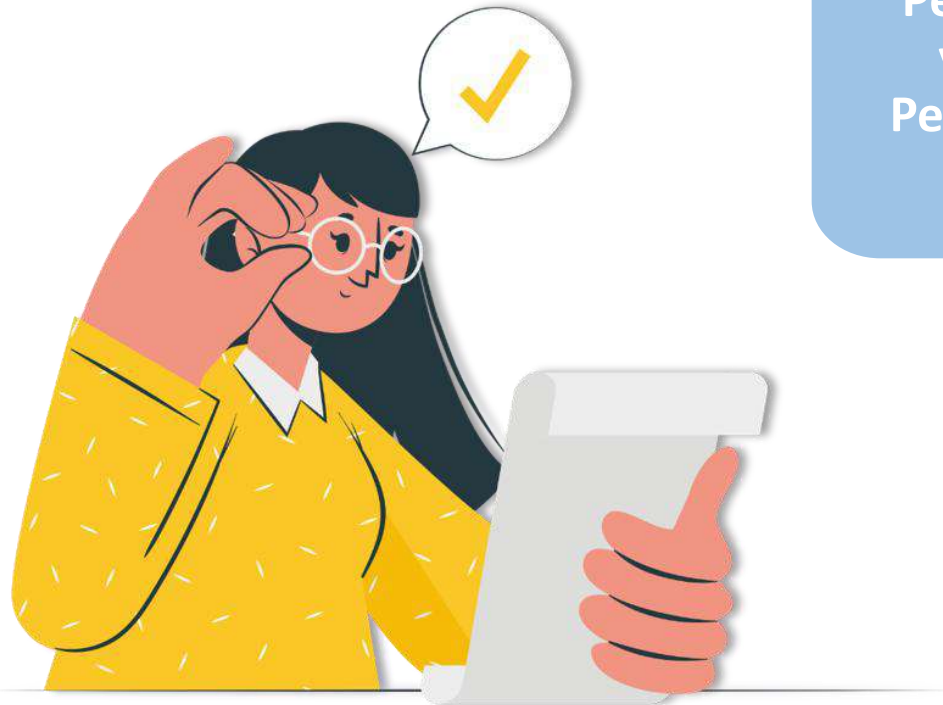
UPAYA DALAM MENYUSUN LAPORAN KINERJA





**SMART
DISCUSSION**
SERIES 2022

UPAYA DALAM MENYUSUN LAPORAN KINERJA



Pelaporan dan Evaluasi
yang Berfokus pada
Perencanaan yang Telah
Disusun

Penguraian Faktor
Keberhasilan dan
Kegagalan dalam Mencapai
Target yang Ditentukan

Fokus pada Hasil dari
Rencana Aksi yang Telah
Disusun



SMART DISCUSSION SERIES 2022

Terima Kasih

Visit Us :



smartid_



Smart ID



smartid_



SmartID



smartid.co.id